

**KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PENERAPAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT**

Imelda Dewi Junianto

NPP. 30.0549

Asdraf Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: imeldadewi1206@gmail.com

Dosen Pembimbing Skripsi : Busiri, S.Pd.I., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Electronic-Based Services is an activity carried out by the government in providing services to the public on an electronic basis, as well as knowing how the level of service quality (e-government) is in accordance with applicable laws and regulations (contained in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic Electronic Based Government). The implementation of electronic-based services aims to create clean, effective, efficient, transparent and accountable governance as well as to create quality and reliable public services.* **Purpose:** *this research is intended to obtain a description of the performance of the state civil apparatus in implementing SPBE within the West Bandung Regency BKPSDM, then to find out what are the inhibiting factors and the efforts made to overcome these inhibiting factors.* **Method:** *This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. Research uses performance theory according to Sembiring (2017: 98) with 5 (five) dimensions, namely: productivity; service quality; responsiveness; responsibility and accountability.* **Result:** *The performance of the state civil apparatus within the scope of West Bandung Regency BKPSDM cannot actually be said to be good. The efforts carried out by the West Bandung Regency BKPSDM will not be separated from the many obstacles or obstacles it faces, namely: limited apparatus resources; the implementation of an electronic-based government system that has not been maximized; and inadequate infrastructure.* **Conclusion:** *To overcome these obstacles, the efforts that can be made by the West Bandung District BKPSDM to streamline the performance of existing state civil servants in implementing an electronic-based government system, namely: increasing the qualifications and competence of employees in the field of information technology; carry out culture and habituation in the application of SPBE in various aspects of work for all employees; and improving facilities and infrastructure that support the implementation of an electronic-based government system.*

Keywords: *Performance, State Civil Apparatus (ASN); Electronic Based Government System (SPBE).*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelayanan Berbasis Elektronik merupakan suatu kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan pada publik dengan berbasis elektronik, serta mengetahui bagaimana tingkat kualitas pelayanan (*e-government*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. **Tujuan:** penelitian ini bermaksud untuk memperoleh deskripsi mengenai kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, kemudian mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori kinerja menurut Sembiring (2017: 98) dengan 5 (lima) dimensi yaitu: produktivitas; kualitas layanan; responsivitas; responsibilitas dan akuntabilitas. **Hasil/Temuan:** Kinerja dari aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM kabupaten bandung Barat sebenarnya belum dapat dikatakan baik. Usaha yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat tidak akan lepas dari sedikit banyaknya kendala atau hambatan yang dihadapi, yaitu: terbatasnya sumber daya aparatur; penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum maksimal; dan sarana prasarana yang belum memadai. **Kesimpulan:** Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk mengefektifkan kinerja aparatur sipil negara yang ada dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu: meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi; melakukan budaya dan pembiasaan dalam penerapan SPBE di berbagai aspek pekerjaan bagi seluruh pegawai; dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kata kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara (ASN); Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran penting dalam menentukan suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai apapun rencana yang sudah diatur dan disusun serta dilengkapi dengan berbagai jenis sarana prasarana dalam suatu organisasi, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan memadai tidak akan menghasilkan keluaran atau output yang baik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 1 menjelaskan bahwa: “Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan”.

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Secara garis besar menjelaskan tentang nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai pancasila, setia dan mempertahankan ideologi pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, keteladanan dalam

mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara.

Pemerintahan berbasis elektronik *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Sistem pemerintah berbasis elektronik memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sebuah program dari pemerintah yang dimana dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penerapan SPBE pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa tujuan seperti pengolahan data kepegawaian dan kinerja aparatur dari penerapan SPBE di Kabupaten Bandung Barat.

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga untuk mencapai hal tersebut pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dan berkualitas menjadi faktor penting tercapainya tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai kinerja yang baik tentu perlu adanya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat terhadap Aparatur Sipil Negara yang bekerja di kantor tersebut. Digitalisasi merupakan peralihan dari operasional yang tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, digitalisasi mengubah sesuatu menjadi digital alias memanfaatkan teknologi dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi dimana saja dan kapan saja seolah-olah tanpa mengenal batas dan ruang waktu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dalam kinerja aparatur sipil negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Dari segi kompetensi yang dimiliki pegawai di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dalam hal pendidikan, masih terdapat beberapa pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat jabatan pegawai tersebut, sehingga akan berpengaruh pada tingkat pemahaman dan keterampilan serta kecakapan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu juga kinerja dari aparatur sipil negara saat ini belum optimal, pola kinerja aparatur yang diterapkan belum sesuai dengan perencanaan keselarasan Peraturan perundang-undangan dan teori yang ada. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas dan kuantitas dari aparatur itu sendiri maka dari itu pemerintah harus menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi dan karakteristik kemampuan yang dibutuhkan.

Sumber daya manusia yang bekerja pada BKPSDM Kabupaten Bandung Barat juga belum begitu mahir dalam penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam pemberian pelayanan publik, seperti penggunaan aplikasi *e-office*, pelaporan kinerja secara online atau *e-kinerja* dan penggunaan absensi online. Pelaksanaan mutasi atau rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada evaluasi yang dilakukan secara mendalam oleh tim penilai kerja atau badan pertimbangan, jabatan dan kepangkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Aparatur sipil negara di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat wajib diberikan pengembangan kompetensi agar dapat menghasilkan peningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan guna kelancaran dalam

pelaksanaan tugas yang dilaksanakannya untuk mendapatkan kinerja yang baik bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Khaidarmansyah (2022) yang berjudul “Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung”, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan SPBE, Pemerintah Provinsi Lampung perlu mendengarkan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait SPBE. metode Perencanaan dan pelaksanaan SPBE yang inklusif, terintegrasi dan bijaksana sangat dibutuhkan. Rancangan kebijakan SPBE menjanjikan untuk mengatasi keangkuhan kelembagaan dan sektor pekerjaan masih umum.

Penelitian dari Abd. Aziz Bouty (2018) yang berjudul “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)”, menjelaskan bahwa Proses evaluasi sistem pemerintahan Basis elektronik pemerintah kota Gorontalo Penelitian berjalan dengan baik. proses evaluasi dilakukan pengukuran tingkat jari Kematangan Kemampuan Teknis Memanfaatkan kematangan e-government Model (eMM) Pengukuran selesai 3 area, 7 aspek, 35 indikator SPBE Perbaikan sistem *E-government* Kota Gorontalo sekarang Berjalan dengan baik, ternyata Dengan hasil pengukuran level Keuntungan total kedaluwarsa SPBE Nilai indeks 2.88 dengan predikat "BAIK".

Penelitian dari Ni Putu Juli Astuti (2021) yang berjudul “Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia”, menjelaskan bahwa menurut penilalan PermenPANRB tahun 2019 tentang pelaksanaan SPBE, Nilai indeks yang diperoleh pemerintah daerah suatu kabupaten di Indonesia adalah 2.88 Gunakan predikat "baik". Beberapa aspek penilaian SPBE dinyatakan memiliki nilai sebagai berikut: Kontribusi yang sangat rendah mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE salah satunya wilayah Indonesia Salah satunya adalah Aspek 5, Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi dengan ketiga indikator penilaian (Indikator 22 Indikator 23 dan Indikator 24) Setiap metrik di Aspek memiliki kelemahannya sendiri sebagai titik awal nilai rendah yang terukur saran perbaikan untuk meningkatkan skor ulasan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Khaidarmansyah yang berjudul “Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung” menggunakan teori optimalisasi dalam melakukan penelitian, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori kinerja dalam membahas terkait penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Aziz Bouty yang berjudul “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan *E-government Maturity Model* (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)” perbedaannya yaitu terletak pada waktu pelaksanaan penelitian dan pembahasannya yaitu terkait Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan *E-government Maturity Model* (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo), berbeda dengan pembahasan yang diambil oleh peneliti yaitu terkait kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Juli Astuti yang berjudul “Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia”, perbedaannya terletak pada tahun pelaksanaan penelitian dan pokok bahasan penelitian oleh Christo Vorando Amalo membahas mengenai analisis aspek penerapan SPBE pada salah satu Kabupaten yang ada di Indonesia, berbeda dengan pokok bahasan yang diambil oleh peneliti yaitu terkait dengan kinerja dari aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kinerja aparatur sipil negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Metode Kualitatif menurut Sugiyono (2018:9-10) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimanapeneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang kinerja aparatur sipil negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Kinerja menurut Dwiyanto dalam Sembiring (2017: 98) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Dalam mengukur kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bandung Barat, penulis menggunakan indikator kinerja yang peneliti ambil dari pendapat dari Dwiyanto dalam Sembiring (2017: 98) sebagai berikut:

3.1.1 Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi. tetapi jugamengukur efektivitas layanan. Produktivitas biasanya dipahami sebagai rasio input ke output. Ukur berapa banyak layanan publik yang dapat memberikan hasil yang diharapkan. Produktivitas terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. Efisiensi

penerapan SPBE yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dapat mempermudah dalam pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok fungsi dari BKPSDM Kabupaten Bandung. Namun dalam pelaksanaannya masih butuh waktu penyesuaian bagi aparatur sipil negara dalam melakukan kerjanya dengan sistem elektronik.

b. Efektivitas

Efektivitas penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kinerja aparatur sipil negara BKPSDM Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikatakan efektif karena belum sepenuhnya sumber daya aparatur paham akan teknologi sehingga belum berkompeten dalam pengaplikasiannya.

c. Hasil (Output)

Hasil atau output merupakan akhir yang dicapai dari segala perencanaan dan pelaksanaan dari penerapan program SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dalam jangka pendek. Melalui penerapan SPBE pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya aparatur BKPSDM Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih mudah dan cepat terselesaikan. Hal ini dilakukan untuk mendukung implementasi *e-government* di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat meskipun dalam pelaksanaannya dibutuhkan beberapa kali penyesuaian karena adanya perubahan yang terjadi.

3.1.2 Kualitas Layanan

Kepuasan publik penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengevaluasi kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan komunitas sebagai indikator kinerja adalah informasi tentang kepuasan komunitas biasanya dapat diperoleh dengan mudah. Kualitas layanan terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. Pelayanan

Dalam hal ini pelayanan yang dimaksud adalah memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat terhadap kinerja dari aparatur yang bekerja di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. BKPSDM Kabupaten Bandung Barat sudah menerapkan pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan cukup baik melalui website resmi milik BKPSDM Kabupaten Bandung Barat yang didalamnya memuat informasi dan kabar terkini untuk diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan, selain itu juga sudah diterapkannya layanan absensi online bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dari aparatur tersebut.

b. Mutu

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Jumlah pegawai di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat bersifat dinamis atau berubah-ubah karena setiap bulannya ada pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, mutasi instansi dan daerah kerja serta yang meninggal dunia. Masyarakat berharap agar BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dapat terus berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Kepuasan

Kepuasan merupakan ukuran yang menentukan seberapa baik produk atau layanan dari kinerja aparatur sipil negara di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk memenuhi harapan masyarakat. Dari aspek kepuasan belum dapat dipenuhi oleh sumber daya aparatur karena kinerja yang dihasilkan masih belum memuaskan. Hal ini terjadi karena terjadinya penumpukan pekerjaan namun jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten dalam hal penggunaan teknologi informasi masih terbatas.

3.13 Responsivitas

Responsivitas penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat merupakan kemampuan BKPSDM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, merumuskan agenda dan prioritas pelayanan, dan merumuskan rencana pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam penerapan SPBE guna memberikan layanan berbasis elektronik yang efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Singkatnya, responsivitas disini mengacu pada konsistensi antara rencana dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Responsivitas terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat

Peran aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. BKPSDM Kabupaten Bandung Barat selalu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pengenalan terhadap adanya aplikasi baru yang akan diterapkan agar dalam pengaplikasiannya dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi sebagai wadah untuk bertanya dan menyalurkan pendapat serta saran masukan bagi BKPSDM Kabupaten Bandung Barat.

b. Kemampuan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BKPSDM sudah menerapkan berbagai jenis aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk menunjang kinerja aparatur sipil negara. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis elektronik. Pelaksanaan rapat evaluasi dilakukan setiap minggunya untuk meninjau pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum selain itu juga untuk mengetahui hambatan yang terjadi untuk dicari jalan keluarnya bersama-sama.

3.14 Responsibilitas

Responsibilitas menunjukkan apakah pelaksanaan kegiatan penerapan SPBE yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi dan rencana yang ada, serta sesuai dengan prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas terdiri dari indikator:

a. Ketepatan Pelaksanaan

Pelaksanaan kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat sudah tepat sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Walaupun masih ditemukan beberapa permasalahan namun kami selalu berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

3.15 Akuntabilitas

Akuntabilitas pelaksanaan penerapan SPBE mengacu pada jumlah pejabat politik yang dipilih oleh rakyat untuk kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan program kerja BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik selaras dengan keinginan publik. Akuntabilitas terdiri dari indikator:

a. Pertanggungjawaban

Setiap program kegiatan yang telah terlaksana wajib untuk dilakukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan hasil kinerja agar dapat menjadi bahan tinjauan dan evaluasi bagi pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang terlaksana terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bentuk pertanggungjawaban yang dihasilkan menjadi lebih transparan dan akuntabel tanpa ada yang perlu dimanipulasi keterangannya. Salah satu bentuk

pertanggungjawaban hasil kinerja aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari hasil rekapan absensi online setiap bulannya untuk mengetahui waktu kedatangan pukul 07.30 s/d pukul 16.00 WIB dari hari senin-jumat. Selain itu juga terdapat status tanpa keterangan, dinas luar, cuti dan sakit

3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan wawancara serta observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa faktor yang menghambat dalam kinerja aparatur sipil negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik diantaranya adalah:

3.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Aparatur

Faktor pertama yang menjadi penghambat kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah keterbatasan sumber daya aparatur karena menjadi salah satu faktor terpenting yang akan berdampak pada hasil kinerja pegawai maupun output yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. Kurangnya sumber daya aparatur yang berkompeten dan ahli dalam hal teknologi menjadi penghambat untuk meningkatkan kinerja. Hambatan ini muncul karena adanya pegawai yang belum sadar akan pentingnya kompetensi dan masih beranggapan bahwa keahlian dalam penggunaan teknologi digital hanya diperuntukan untuk pegawai yang masih muda.

3.2.2. Penerapan SPBE Belum Maksimal

Faktor kedua yang menjadi hambatan kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat adalah SPBE ini belum dapat terimplementasi secara menyeluruh kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terjadi karena masih banyak sumber daya aparatur yang gagap teknologi dan tidak ingin memperbaharui kemampuan dalam dirinya.

3.2.3. Sarana Prasarana yang Belum Memadai

Faktor terakhir yang menjadi penghambat kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat adalah sarana prasana yang belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai masih menjadi faktor penghambat kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Mengingat bahwa dalam penerapannya semua berbasis digital sehingga memang kinerja yang dihasilkan tidak dapat maksimal jika tidak diimbangi dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang belum memadai itu seperti kekurangan jumlah komputer, terdapat beberapa komputer yang proses penggunaannya lambat sehingga memperlambat hasil pekerjaan. Selain itu juga masih sering terjadi jaringan internet yang kurang stabil

3.3 Upaya yang Akan Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3.3.1 Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai Dalam Bidang Teknologi Informasi

Upaya yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya aparatur adalah dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi karena melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi ini dapat memaksimalkan hasil kinerja dari sumber daya aparatur yang ada di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kami dalam mengatasi permasalahan terbatasnya jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten adalah dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi secara internal untuk pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam

bidang teknologi informasi.

3.3.2 Melakukan Budaya dan Pembiasaan Dalam Penerapan SPBE Di Berbagai Aspek Pekerjaan Bagi Seluruh Pegawai

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi permasalahan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum maksimal dan menyeluruh kepada masing-masing pegawai adalah dengan melakukan budaya dan pembiasaan dalam penerapan SPBE pada berbagai aspek pekerjaan yang diperuntukkan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Pihak BKPSDM Kabupaten Bandung Barat sudah mulai membiasakan seluruh pegawai untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam setiap aspek pekerjaan bagi seluruh pegawai untuk menunjang kinerja dan menghasilkan output yang maksimal.

3.3.3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Menunjang SPBE

Pihak BKPSDM Kabupaten Bandung Barat terus berupaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi kekurangan dan penghambat kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Hal ini wajib menjadi perhatian khusus karena tanpa adanya fasilitas sarana prasarana yang memadai, produk yang dihasilkan juga tidak akan maksimal dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Hal ini dilakukan dengan mulai mendata terkait barang inventaris kantor apa saja yang sudah bermasalah untuk kemudian dilaporkan kepada bagian keuangan untuk dimasukkan dalam RAB perbaikan jika memang masih ada anggaran yang tersedia agar dapat segera terselesaikan permasalahan tersebut dan tidak menjadi berkepanjangan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar dapat berdampak baik bagi aparatur sipil negara dalam menerapkan SPBE di lingkup pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa permasalahan yang terjadi adalah SPBE ini belum dapat terimplementasi secara menyeluruh kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terjadi karena masih banyak sumber daya aparatur yang gagap teknologi dan tidak ingin memperbaharui kemampuan dalam dirinya.

IV. KESIMPULAN

Kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat berdasarkan analisis menggunakan teori Dwiyanto dalam Sembiring (2017: 98) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat belum bisa dikatakan efektif karena tidak memenuhi dimensi produktivitas dan kualitas layanan.

Faktor penghambat dalam Kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat yaitu: terbatasnya sumber daya aparatur; penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum maksimal; dan sarana prasarana yang belum memadai.

Upaya yang telah dilakukan oleh BKSDM Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hambatan-hambatan pengembangan tersebut adalah: meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi; melakukan budaya dan pembiasaan dalam penerapan SPBE di berbagai aspek pekerjaan bagi seluruh pegawai; dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M., & Yusof, H. (2011). Quality in Qualitative Studies: The Case of Validity, Reliability and Generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 25-64.
- Abd. Aziz Bouty, dkk. (2018). "Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-government Maturity Model (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo)". *Jurnal Teknik Informatika*. Vol. 23, No. 1, 16-24
- Br Sembiring, J. (2017). *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Prasekolah (Pertama)*. Sleman: CV Budi Utama.
- Ni Putu Juli Astuti, dkk. (2021). "Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia". *Jurnal Studi Teknologi Informasi*. Vol. 2, No. 3, 2-9
- Khaidarmansyah, dkk. (2022). "Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung". *Jurnal Manajemen*. Vol. 16, No. 1, 130-155
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah